

**KAJIAN PERAN STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN
TERHADAP PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT**
Study of Fishing Port Toward Marine Fisheries Development

ERNANI LUBIS

Abstract

Fishing port has very important role toward the development of marine fisheries, since fishing port is the economic center from landed fish until the fish to be marketed in the port. The purpose of this study was to determine how far the strategic role of the fishing port to the development of marine fisheries and fishing industries through qualitative descriptive methods. Fishing port as a center of economic activity of fishing in Indonesia, the conditions are very limited. Currently the number of fishing ports incomparable to vast potential of fisheries and the vast marine areas especially in eastern Indonesia. The condition of existing facilities at fishing port most unfit or sub-standard so it is difficult to expect domestic and foreign investors to come invest. Undeveloped fishing port in Indonesia is also due to weak management capabilities along with weak policy support and legal instruments. The strategic role of fishing port to marine fisheries would still not optimal. It indicated, among others, are still not done with good handling of the catch in the fishing port which result in decreased quality and selling price; still not companies that invest in industrial processing because of limited facilities and poor management and availability of raw materials that are not continuous

Keywords : fishing port, role, marine fisheries

PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan *center* perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari *fishing ground*-nya sampai awal ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Meningkatnya produksi hasil tangkapan antara lain karena masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang ada di laut, semakin meningkatnya kebiasaan penduduk untuk makan ikan; semakin berkembangnya industri perikanan dan juga karena semakin meningkatnya pendapatan penduduk per kapita. Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang memicu meningkatnya usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di laut sehingga berpeluang untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan yang didaratkan. Peningkatan produksi hasil tangkapan tersebut perlu kiranya diimbangi dengan pembangunan ataupun pengembangan pelabuhan perikanan yang menjadi pusat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Namun berdasarkan pada beberapa penelitian antara lain menurut Lubis *et al.* (1999) bahwa sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia (70%) ternyata masih belum berfungsi optimal dan belum dilengkapinya dengan fasilitas yang memadai dan modern yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelabuhan perikanan yang ada belum berkembang. Perlu kiranya berbagai pemikiran dan analisis untuk mencari solusi mengingat pembangunan suatu pelabuhan perikanan memerlukan investasi yang tidak sedikit.

Peran strategis pelabuhan perikanan dalam perikanan laut adalah juga untuk mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi juga regional dan internasional. Fungsi utama pelabuhan perikanan adalah berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa untuk kapal-kapal yang telah selesai

menangkap ikan dari daerah penangkapan (contoh adanya fasilitas pendaratan ikan yang aman dan pemeliharaan kapal); untuk hasil tangkapan yang telah didaratkan di pelabuhan perikanan (contoh adanya kegiatan penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan dan untuk pengembangan kegiatan industri perikanan.

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui peran strategis pelabuhan perikanan terhadap pengembangan perikanan laut yang meliputi kapal-kapal penangkap ikan dan hasil tangkapan; peran pelabuhan perikanan terhadap pengembangan industri perikanan.

METODE

Analisis peran strategis pelabuhan perikanan ini dilakukan berdasarkan pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, pengalaman dalam studi lanjutan dan dengan tunjangan beberapa literatur baik level nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Peran Pelabuhan Perikanan terhadap Aktivitas Perikanan Laut

Peran pelabuhan perikanan terhadap perikanan laut dapat diartikan bahwa pelabuhan perikanan penting keberadaannya untuk memberikan pelayanan terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan serta hasil tangkapan yang didaratkan.

1) Peran Pelabuhan Perikanan terhadap Kapal-kapal Penangkapan Ikan

Peran pelabuhan perikanan terhadap kapal-kapal penangkapan ikan adalah terkait dengan fungsinya sebagai tempat yang aman bagi kapal-kapal yang datang untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan. Dalam hal ini pelabuhan harus menyediakan dermaga, kolam pelabuhan dengan kedalaman yang cukup agar kapal besar dapat bergerak leluasa. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Perikanan, 2000 bahwa cukup banyak pelabuhan perikanan yang dangkal

perairannya akibat sedimentasi khususnya pelabuhan perikanan yang berada di muara sungai. Hal tersebut akan menghambat kapal untuk masuk ke kolam pelabuhan sehingga kapal harus menunggu pasang agar bisa bersandar di dermaga. Dermaga hendaknya juga harus cukup kapasitasnya untuk menampung kapal-kapal yang masuk. Dermaga yang sudah tidak sesuai lagi dengan kapasitasnya menjadikan kapal-kapal melakukan antrian ketika merapat sehingga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan. Rambu-rambu navigasi yang cukup juga harus disediakan oleh pelabuhan untuk keamanan kapal-kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan.

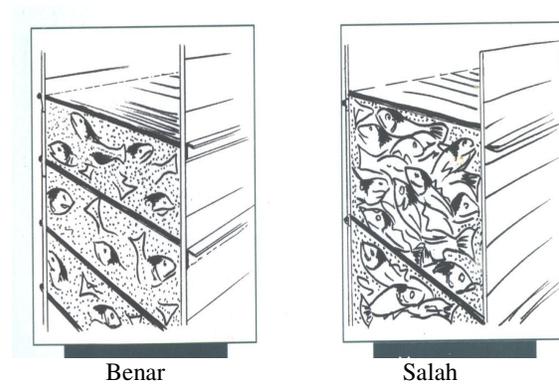
Suatu kapal tentunya akan memerlukan pemeliharaan secara teratur mengenai badan kapal dan peralatannya untuk menjamin kelayakan berlayar lagi di laut, misalnya adanya bagian-bagian kapal yang perlu dibersihkan, diperbaiki, atau dicat kembali. Dengan demikian pelabuhan perikanan haruslah melengkapi fasilitasnya untuk hal-hal tersebut, terutama pelabuhan perikanan berskala besar juga dapat melengkapinya dengan fasilitas untuk memperbaiki peralatan-peralatan elektronik.

2) Peran Pelabuhan Perikanan terhadap Hasil Tangkapan

Pelabuhan perikanan sangat berperan penting dalam penanganan hasil tangkapan yang didaratkan. Hasil tangkapan ikan yang didaratkan haruslah ditangani dengan sebaik-baiknya agar tidak menurun mutunya. Oleh sebab itu pelabuhan perikanan harus dapat memberikan jasa-jasanya untuk memberikan penanganan hasil tangkapan. Jasa-jasa tersebut adalah :

(1) Penanganan untuk mempertahankan mutu ikan dan memberikan nilai tambah terhadap produksi hasil tangkapan yang didaratkan;

Pelabuhan perikanan hendaknya mampu memberikan jasa terkait penanganan mutu hasil tangkapan didaratkan, dengan kata lain ketika ikan didaratkan dalam kualitas baik, pelabuhan harus dapat menyediakan jasa penanganan yang baik sampai saat ikan dijual ke konsumen. Penanganan yang dilakukan antara lain dengan memasukkan ikan ke dalam *cool room* sesaat setelah didaratkan agar terjaga mutunya, atau memberikan es secukupnya. Perlu diperhatikan teknik pemberian es terhadap ikan dalam boks fiber atau basket. Menurut (Anonimous, 1987) bahwa pemberian es ke dalam suatu box yang berlapis hendaknya jarak antara sekat dengan tinggi lapisan ikan sekecil mungkin; es yang digunakan adalah es curah. Seandainya yang digunakan adalah basket tunggal atau tidak berlapis maka es dituang pada setiap lapisan ikan.



Gambar 1. Posisi pemberian es terhadap ikan dalam boks berlapis

Proses penanganan merupakan suatu hal yang penting untuk hasil tangkapan ikan segar mulai saat ikan didaratkan di pelabuhan perikanan sampai selama transportasi pendistribusian menuju *hinterland*-nya. Penanganan ikan harus cepat dilakukan untuk memperlambat kebusukan. Salah satu keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah pendaratan ikan harus dapat dilakukan secara cepat dan penseleksian ikan yang cermat. Demikian halnya dalam hal pengangkutan menuju *hinterland* yaitu harus dilakukan dengan cepat dan tepat, agar tingkat kesegarannya dapat dipertahankan. Menurut Clucas dan Ward (1996) bahwa hal-hal prinsip yang perlu diperhatikan selama penanganan ikan mulai saat pembongkaran sampai pengangkutan ke TPI atau ke *hinterland* : pengontrolan suhu ikan selama penanganan agar selalu dingin; penanganan dilakukan dengan cepat dan tepat; memperkecil sentuhan fisik secara langsung dengan ikan; menghindari sengatan langsung sinar matahari pada tubuh ikan dan memperkecil terjadinya kontaminasi terhadap ikan.

Hasil tangkapan yang tidak terjual dalam jumlah besar pada hari itu maka berpeluang ikan tersebut untuk diolah agar dapat memberikan nilai tambah. Dengan demikian pelabuhan perikanan hendaknya dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam pengolahan ikan. Di pelabuhan perikanan yang berskala sedang sampai besar, umumnya sudah terdapat perusahaan industri perikanan mulai dari pemindangan, pengasapan, pengasinan, bakso dan naget ikan sampai pengalengan ikan.

(2). Mampu melakukan pembongkaran secara cepat dan penseleksian ikan secara cermat;

Ikan merupakan komoditi yang bersifat *perishable* atau mudah membusuk sehingga perlu dilakukan pembongkaran cepat dan penseleksian secara cermat. Faktor-faktor yang memperlambat pembongkaran adalah tertundanya waktu bongkar, baik karena terjadinya antrian bongkar di pelabuhan, pendangkalan kolam pelabuhan sehingga kapal harus berlabuh jauh dari pantai dan menghendaki pengangkutan secara manual ke tepi pantai atau TPI dan juga faktor keterbatasan fasilitas bongkar seperti *crane*. Keterlambatan waktu bongkar akan mengakibatkan turunnya mutu ikan atau produsen harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli es sebagai

pengawet. Demikian halnya penyeleksian ikan harus dilakukan secara cermat agar terseleksi dengan baik menurut spesies, ukuran dan kualitas ikan tersebut. Harga jual akan berbeda menurut spesies, ukuran maupun kualitas.

- (3). Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan ikan;

Pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan satu komponen penting dalam sistem perikanan laut yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Pelelangan ikan merupakan suatu aktivitas utama terpenting di pelabuhan perikanan sehingga perlu dikelola secara optimal, karena aktivitas ini berpengaruh terhadap penerimaan hasil penjualan nelayan; yang pada tahap selanjutnya, menentukan berapa besaran pendapatan nelayan (nelayan pemilik dan nelayan buruh). Pelelangan ikan merupakan satu-satunya mekanisme pemasaran ikan yang bertujuan untuk mendapatkan harga yang layak baik bagi nelayan maupun pada pedagang. Namun sayang sekali aktivitas lelang ini semakin tidak terlaksana di banyak pelabuhan perikanan Indonesia.

Berdasarkan hasil survei tahun 2010, terdapat 968 pelabuhan perikanan/PP dan Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI di Indonesia; Sebagian besar PP/PPI tersebut baru dimanfaatkan secara minimal dalam memasarkan hasil tangkapan melalui pelaksanaan pelelangan ikan sehingga berdampak terutama minimalnya pendapatan nelayan. Menurut Lubis *et al*, 2005, 40 % dari PP dan PPI di Pantai Utara Jawa, tidak lagi melaksanakan pelelangan ikan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Hal ini selain berpengaruh pada harga jual juga pada mutu ikan.

Dampak mekanisme pemasaran tanpa lelang mengakibatkan peran bakul/tengkulak untuk menekan harga ikan semakin besar sehingga harga jual ikan dari nelayan menjadi tidak layak. Nelayan hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*) karena posisi tawar yang lemah atau bahkan tidak berperan sama sekali. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa salah satu hal yang mengurangi pendapatan nelayan adalah belum optimalnya pengelolaan penjualan hasil tangkapan nelayan di pelabuhan perikanan karena dalam memasarkan hasil tangkapannya nelayan masih terikat pada tengkulak.

- (4). Mampu melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan secara akurat melalui sistim pendataan yang benar;

Pendataan hasil tangkapan adalah pertama kali dilakukan di pelabuhan perikanan sehingga tidak akuratnya pendataan di pelabuhan akan mencerminkan ketidakakuratan data secara nasional. Hal tersebut akan berimplikasi pada

banyak hal seperti tidak akuratnya hasil penelitian, baik bagi pengambil keputusan/pemerintah terhadap pengembangan pelabuhan maupun bagi akademisi dalam rangka program penelitiannya. Dalam hal perencanaan pengembangan produksi perikanan, pemerintah juga memerlukan data statistik perikanan yang akurat. Oleh karena itu kegiatan mengumpulkan data perikanan semakin penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak terkait. Peranan data dan informasi sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

Bagi pihak swasta, data hasil tangkapan yang tidak benar dari pelabuhan akan mengacaukan perkiraan investasi di bidang industri perikanan dan banyak lagi lainnya. Dalam arti kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam berbagai hal terkait dengan hasil tangkapan, akan meragukan bahkan mendapatkan kesimpulan tidak benar. Pendataan yang benar adalah mendata seluruh hasil tangkapan dari setiap kapal yang mendaratkan ikannya di pelabuhan melalui penimbangan di Tempat Pelelangan Ikan/TPI dan tidak berdasarkan pada perkiraan.

Selain terhadap hasil tangkapan ikan, pelabuhan perikanan juga berperan penting terhadap pengguna yaitu sebagai pusat dan tukar menukar informasi antar para pengguna di pelabuhan; mampu meningkatkan pendapatan para pengguna di pelabuhan antara lain dengan adanya pelaksanaan pelelangan ikan dan tersedianya bahan perbekalan yang lebih murah dibanding di luar pelabuhan; mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna untuk beraktivitas di pelabuhan atau kapal yang akan masuk pelabuhan terhindar dari gelombang tinggi atau juga terhindar dari aktivitas para premanisme. Menurut Yusuf, 2005 bahwa pelaksanaan pelelangan ikan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nelayan karena harga yang terbentuk lebih baik. Pengoptimalan aktivitas pelelangan ikan tentunya akan mengoptimalkan juga pemanfaatan TPI yang ada.

Pelabuhan selanjutnya akan berdampak pada beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat di suatu wilayah karena heterogenitas penduduknya akibat terjadinya urbanisasi. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan akan berpeluang untuk penerapan tenaga kerja baik dari lingkungan sekitar maupun dari luar daerah. Oleh sebab itu kita dapat melihat betapa beragamnya suku dan budaya di suatu kota pelabuhan.

Dampak positif berkembangnya pelabuhan akan memacu berkembangnya suatu wilayah berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan perikanan dan aktivitas ekonomi terkait seperti berkembangnya aktivitas transportasi, industri terkait (penangkapan ikan pengolahan ikan, pemasaran ikan) dan juga pertokoan terkait kebutuhan para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; para pedagang serta konsumen lainnya.

2 Peran Strategis Pelabuhan Perikanan terhadap Pengembangan Industri Perikanan

Pelabuhan perikanan sangat berperan terhadap pengembangan industri perikanan di pelabuhan. Keuntungan dari industri perikanan yang berlokasi di pelabuhan akan menghemat biaya transportasi darat

khususnya apabila produknya ditujukan untuk pasar ekspor.

Produksi hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan sering berlimpah pada musim puncak sehingga sering merugikan nelayan karena turunnya nilai jual. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1998, kasus yang terjadi adalah nelayan sampai membuang hasil tangkapannya ke laut ketika musim puncak karena kurangnya fasilitas di pelabuhan perikanan yang dapat menampung kelebihan ikannya baik itu *cold storage* maupun usaha industri pengolahan ikan seperti yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang (Lubis *et al*, 1999). Menurut Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan bahwa pelabuhan perikanan khususnya tipe samudera dan nusantara hendaknya dapat merangsang timbulnya perusahaan industri perikanan sehingga perlu menyediakan bahan bakunya.

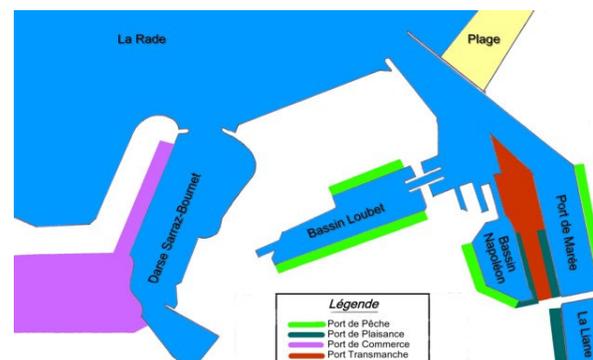
Perusahaan industri pengolahan ikan yang berlokasi di suatu pelabuhan perikanan atau sekitarnya umumnya menggunakan sebagian atau keseluruhan bahan bakunya dari pelabuhan tersebut. Ketersediaan bahan baku secara kontinu diperlukan agar pengusaha mendapatkan kepastian dalam usahanya. Apabila bahan baku yang ada masih belum mencukupi, maka perusahaan harus mendatangkan bahan baku dari daerah lain. Menurut Chaussade (1984) bahwa suatu pelabuhan perikanan industri harus disertai dengan keberadaan sektor pengolahan yang mengawali pemberian nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan. Pada tahun 2010 Pelabuhan Perikanan Industri Lorient (pelabuhan perikanan terbesar kedua Prancis dilihat dari volume produksi) dari 26.000 ton ikan yang didaratkan telah dapat mengolah sekitar 100.000 ton melalui 270 perusahaan pengolahan yang ada di pelabuhan tersebut dimana bahan bakunya selain berasal dari pelabuhan tersebut juga dari Negara-negara tetangga (Port de Peche Lorient, 2010). Secara ekonomi, pelabuhan perikanan mempunyai andil penting dalam memasarkan hasil tangkapan yang didaratkan baik lokal, nasional maupun ekspor. Perusahaan-perusahaan pengolahan ikan yang berlokasi di pelabuhan perikanan akan lebih efisien secara ekonomis ketika produknya akan diekspor karena dapat mengurangi biaya transportasi darat.

Menurut R. Bintarto yang dikutip Indriyanto (2005), pelabuhan mempunyai empat arti. Pertama, arti ekonomis karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat. Kedua, arti budaya karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Ketiga, arti politis karena pelabuhan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan urat nadi negara, maka harus dipertahankan. Keempat, arti geografis karena keterkaitannya dengan lokasi dan syarat-syarat dapat berlangsungnya suatu pelabuhan.

Adanya atau berkembangnya industri di suatu pelabuhan tentu akan berdampak juga dalam meningkatkan perekonomian kota/kabupaten sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dicapai antara lain melalui peningkatan usaha transportasi; penyediaan bahan kebutuhan bagi para pengguna di pelabuhan dan berkembangnya aktivitas perbankan.

Indonesia menduduki ranking ke 14 dari 216 negara di dunia untuk ekspor, Dengan kata lain Indonesia masih cukup diperhitungkan. Dengan demikian semakin penting peranan pelabuhan, baik itu pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan, sebagai tempat awal pendistribusian. Berdasarkan data tahun 1998 bahwa pelabuhan niaga mendominasi ekspor hasil perikanan (98 %), sisanya diekspor melalui pelabuhan perikanan dan pelabuhan udara. Sampai saat ini kondisi tersebut masih tetap.

Aktivitas ekspor hasil perikanan melalui transportasi laut sering menimbulkan permasalahan mengingat besarnya biaya transportasi darat dari lokasi pelabuhan perikanan ke pelabuhan niaga yang jaraknya seringkali berjauhan. Sebagai contoh negara-negara di Eropa, Prancis misalnya lokasi antara pelabuhan niaga (*port de commerce*) dan pelabuhan perikanan (*port de pêche*) serta pelabuhan wisata (*port de plaisance*) dan port de transmanche sering dirancang berdekatan, sehingga tidak perlu biaya transportasi darat yang besar (Gambar 1).



Gambar 2. Lay out Pelabuhan Perikanan Boulogne-sur-Mer (Prancis)

Sumber : Pelabuhan Perikanan Boulogne-sur-Mer, 2004

Saat ini belum banyak perusahaan industri pengolahan ikan yang berinvestasi di pelabuhan perikanan. Beberapa diantaranya karena kurangnya bahan baku yang berasal dari pelabuhan. Menurut Lubis dan Sumiati (2011) bahwa produksi hasil tangkapan PPN Pelabuhanratu dalam menunjang industri pengeolahan masih terbatas, hanya beberapa jenis ikan yang hasil proyeksinya menunjukkan peningkatan sampai tahun 2017 yaitu cakalang, tongkol, tuna, peperek, jangilus, layaran dan pedang-pedang. Sebaliknya di Negara-negara Eropa, sebanyak 150 perusahaan industri pengolahan telah terkonsentrasi di pelabuhan perikanan, sebagai contoh Pelabuhan Perikanan Boulogne-sur-Mer telah menjadi pusat pengolahan ikan

terbesar di Eropa. Ikan yang diolah tidak hanya berasal dari hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan tersebut tetapi juga mengimpor dari negara-negara tetangga.

Faktor-faktor yang menjadi semakin pentingnya peran pelabuhan perikanan ini adalah karena luasnya perairan Indonesia dan masih cukup besarnya potensi sumberdaya ikan yang ada. Luas perairan Indonesia termasuk ZEE nya adalah 5,8 juta km² atau menempati urutan ke 3 setelah Amerika Serikat dan Australia. Potensi sumberdaya ikannya sebanyak 6,8 juta ton, yang telah dieksploitasi sekitar 50 %. Di perairan ZEE (Laut Pacific, Lautan Hindia, Laut Timor dan Arafura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi) terdapat potensi besar ikan tuna yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Volume produksi perikanan laut Indonesia meningkat rata-rata 2,2 % per tahun dan nilainya rata-rata 11,39 % selama periode 2005-2009. Ekspor perikanan menurun rata-rata 13,3 % namun demikian nilainya meningkat rata-rata 6,17 % pada periode tahun yang sama. Total hasil ekspor perikanan laut sekitar 95 % dari total hasil perikanan nasional. Dengan semakin meningkatnya permintaan ikan dunia, maka akan semakin besarnya peluang ekspor ikan dari Indonesia. Indonesia sebagai negara eksportir utama produk perikanan juga mengalami berbagai kasus penolakan produk. Berdasarkan data yang dilansir oleh RASSF, sejak tahun 2003 sampai 2008, sering kali ditemukan kasus defension terhadap produk perikanan yang diekspor ke uni Eropa, meskipun kecenderungannya mulai menurun sebagai akibat kompleksitas program sanitasi dan persyaratan mutu dari negara tujuan ekspor. Selain itu tidak harmonisnya standar dan sistem yang digunakan pada negara tujuan ekspor juga menghambat perdagangan internasional. Bahkan data terakhir per Mei 2009 masih belum ditemukan notifikasi terhadap produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa. Dengan demikian diperlukan pengontrolan mutu ikan selain di kapal juga di pelabuhan perikanan. Negara Uni Eropa, berdasarkan EU Regulation No. 853/2004 tentang *specific hygiene rules for food and animal origin* dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa kapal penangkap dan pengangkut ikan yang hasil tangkapannya menjadi bahan baku produk perikanan yang akan diekspor ke UE harus memenuhi persyaratan sanitasi dan *higiene* dan wajib terdaftar/ teregistrasi. Menurut Le Ry (2005) dalam Lubis *et al.* (2010) bahwa telah ada peraturan Uni Eropa sejak 22 Juli 1991 tentang aktivitas penangkapan ikan, yaitu *Hygiene rules for fisherman on board*; [2] *Conditions for preservation of fish on board*; [3] *Conditions for handling on shore*; [4] *Conditions for processing and packing*. Menurut Diatin *et al.*, 2006 bahwa selain penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) agar kualitas produk dapat ditingkatkan, juga perlu kedisiplinan pekerja yang

terlibat langsung. Menurut Pane, 2008 bahwa salah satu kegiatan mempertahankan mutu ikan yang penting di pelabuhan perikanan adalah pemindahan ikan yang tidak mengakibatkan rusaknya mutu : dari kapal ke dermaga dan dari dermaga ke TPI sampai saat sebelum didistribusikan. Pada proses pemindahan tersebut penting penggunaan es dan basket yang bersih. Hasil tangkapan yang didaratkan di banyak pelabuhan perikanan Indonesia, sebagian didiamkan saja tanpa ada penanganan yang baik, misalnya dengan pemberian es atau diletakkan di tempat penyimpanan yang berpendingin.

Pada dasarnya kualitas dan jumlah pelabuhan perikanan yang tersedia saat ini masih belum mencukupi dan penyebarannya belum merata dibandingkan dengan potensi yang ada antara Kawasan Indonesia Barat (80%) dan Kawasan Indonesia Timur (20 %). Pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai baik dalam jenis, kapasitas maupun mekanisasinya (*crane, vessel lift*). Berdasarkan hasil penelitian Lubis *et al.*, 1999 bahwa pelabuhan perikanan di Indonesia pengelolaannya masih belum optimal. Belum optimalnya fungsi pelabuhan perikanan antara lain karena sebagian fasilitas yang ada sudah rusak dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang lama; kapasitasnya sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu diperluas atau dilakukan mekanisasi terhadap fasilitas yang ada; beberapa fasilitas yang ada tidak digunakan karena memang belum diperlukan atau sebaliknya sudah saatnya diperlukan suatu fasilitas tetapi belum tersedia sampai jangka waktu yang lama.

Investasi yang ditanamkan untuk pembangunan pelabuhan perikanan cukup besar sehingga keberhasilan operasionalnya harus pula diperhatikan walaupun diketahui bahwa pengusaha pelabuhan termasuk yang sifatnya *slow yielding* atau pengembalian investasi memerlukan waktu cukup yang lama. Di sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia, pendapatan yang dihasilkan belum dapat menutupi biaya operasionalnya atau setidaknya bisa seimbang, hal ini dikarenakan pengelola masih mementingkan fungsi publik atau fasilitas tidak dikomersialkan seperti halnya apabila pelabuhan dikelola oleh swasta. Dengan semakin pentingnya peran pelabuhan perikanan terhadap aktivitas perikanan laut maka pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola terus memperhatikan pembangunan, pengelolaan dan pengembangannya.

Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi, disamping berfungsi sebagai tempat/ pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang perdagangan, juga menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitannya suatu wilayah atau kota karena adanya dampak ekonomi yang ditimbulkannya (Indriyanto, 2005). Dari konsep ini diperoleh pengertian bahwa ada hubungan antara *hinterland* dengan aktivitas suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah *hinterland* maupun *foreland*, pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume perdagangan dan menarik kapal-kapal bagi perdagangan dari dan ke daerah pedalaman. Operasionalisasi pelabuhan pada hakekatnya merupakan sebuah sistem. Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem dan di dalamnya juga didukung oleh subsistem yang lebih kecil. Kesemuanya ini berlangsung dalam hubungan yang saling kait mengait dan didukung oleh *net of transportation* yang menghubungkan

pelabuhan dengan daerah *hinterland* baik jalan kereta api maupun jalam raya.

Munurut Christopher yang dikutip Indriyanto (2005), pendekatan sistem terhadap pelabuhan mempunyai elemen-elemen anatomi yaitu: 1) Hubungan antara *hinterland* dengan *foreland*; 2) *Port facilities*, yaitu pengungkapan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan transpor pada tingkat regional, nasional, dan internasional/ global; 3) Industri pelabuhan, artinya melihat pelabuhan sebagai sistem industri yang terdiri dari sub-sub sistem. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelabuhan dalam proses ekonomi dan memahami hubungan antara pelabuhan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Transformasi sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan dan masyarakat kota pada umumnya merupakan akibat langsung dari aktivitas pelabuhan. Manajemen yang baik terhadap hal ini akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan terutama sektor ekonomi kecil dan informal. Keberadaan pedagang kaki-lima, pedagang souvenir, pembangunan museum, rumah makan *sea food* yang khas, dan sebagainya akan membawa perubahan sosial ekonomi masyarakat dan pada gilirannya pendapatan pelabuhan dan pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Seperti halnya hasil penelitian Yusuf, H. *et al*, 2005 bahwa pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Lempasing mempunyai dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitarnya.

Indonesia sejauh ini telah berperan baik dalam perikanan dunia, namun masih sangat terbuka peluang untuk dapat dioptimalkan. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar ke-4 dunia setelah China, Peru, Amerika Serikat, dan Chili. Namun dari sisi jumlah, produksi Indonesia masih terbilang kecil, yakni 5,05% dari total perikanan tangkap dunia yang mencapai 95 juta ton. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sektor perikanan dan kelautan yang harus dicarikan solusinya, antara lain ketidakseimbangan pemanfaatan SDI antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) karena armada perikanan tangkap nasional yang masih didominasi armada skala kecil; belum optimalnya dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan baik dari sisi jumlah maupun kelengkapan fasilitas dan rendahnya dukungan lembaga keuangan dan akses nelayan terhadap permodalan.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan tangkap di Indonesia kondisinya sangat terbatas. Saat ini jumlah pelabuhan perikanan tak sebanding dengan potensi perikanan dan luas wilayah laut yang ada khususnya di Indonesia Timur. Kondisi fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan kebanyakan tidak layak atau di bawah standar sehingga sulit mengharapkan investor domestik dan asing untuk

datang berinvestasi. Belum berkembangnya pelabuhan perikanan di Indonesia disebabkan lemahnya dukungan perangkat hukum. Pelabuhan tidak secara spesifik diatur dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ataupun PP No.70 Tahun 1996 tentang Pelabuhan. Pengaturan pelabuhan perikanan hanya pada tingkat Keputusan Menteri No 16/2006 (Nugroho, 2009).

Dengan demikian melihat semakin pentingnya peran pelabuhan perikanan dalam menunjang pengembangan perikanan laut, baik terhadap pengelola, pengguna, kualitas hasil tangkapan maupun terhadap pengembangan ekonomi wilayah, maka sudah seharusnya pengembangannya perlu ditingkatkan baik terhadap penyebaran jumlah, pengelolaan maupun kebutuhan fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1987. La Pêche Hauturière. Bretagne Qualité Mer. Lorient. France
- Chaussade, J. Les Difficulties de la Pêche Industrielle en France : l'Exemple du Port de Lorient. NOROIS. Revue Géographique de l'Ouest et des Pays de l'Atlantique Nord Vol. 31 No. 121 : 141-154
- Clucas I.J. dan Ward A.R. 1996. Post Harvest Fisheries Development : A Guide Handling, Preservation, Processing and Quality. United Kingdom. Natural Resources Institute. 428 pp.
- Diatin, I., N. Farmayanti, Z.E. Lesmana, 2006. Analisis Biaya Kegagalan Internal Pengendalian Mutu Produk Udang Beku (Frozen Shrimp) pada PT DEF, Muara Baru Jakarta. Bulletin Ekonomi Perikanan. Vol VI. No. 2 : 30-41
- <http://www.caplorient.com/Port-de-peche-de-Lorie.5718.0.html>. Port de Peche de Lorient-Keroman, 2010.
- Lubis, E., A.B. Pane, A.R. Sam 1999. Pola Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Efisien dan Efektif di Wilayah Perairan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Laporan Penelitian RUT IV. DRN. Jakarta
- Lubis, E, A.B. Pane, Y. Kurniawan, J. Chaussade, P. Pottier dan C. Lamberts. 2005. Atlas Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa. Kerjasama antara PK2PTM-LPPM-IPB dengan Université de Nantes dan CNRS-Nantes. France.
- Lubis, E dan E.S. dan M. Nirmalanti. 2010. Penanganan Selama Transportasi Terhadap Hasil Tangkapan Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman : Aspek Biologi dan Teknis. Jurnal Mangrove. Vol.10. No.1 :1-7.
- Lubis dan Sumiati. 2011. Pengembangan industri Pengolahan Ikan dari Produksi Hasil Tangkapan di PPN Palabuhanratu. Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut. Vol. II. No. 1 : 39-49
- Nugroho. T. 2009. Rekonstruksi Kebijakan Kelautan. Artikel Harian Kompas November 2009.

- Pane, A.B. 2008. Basket Hasil tangkapan dan keterkaitannya dengan Mutu Hasil Tangkapan dan Sanitasi di TPI PPN Palabuhanratu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* Vol. 13 No. 3 : 150-157
- Permadi, A.; M. Wahyuni; D. R. Monintja; Sunarya dan A.G. Purnomo. 2007. Kebijakan Keamanan Pangan Produk Perikanan: Faktor-faktor Penyebab Penggunaan Formalin oleh Pengolah Ikan Tradisional : Studi Kasus Pantai Utara Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. *Bulletin PSP* Vol XVI No. 2: 201-2015.
- Yusuf, H., K. Moedikdjo, M.S. Saeni dan L.I. Nasution. 2005. Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan terhadap Penterapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat. *Buletin Ekonomi Perikanan* Vol. VI. No. 1 : 57-64.